

**ANALISIS BELANJA MODAL DAN PELAPORANNYA PADA DINAS KESEHATAN
KOTA MANADO**

Oleh:

Yanti Silvia Watuseke¹**Jantje J. Tinangon²****Stanley Kho Walamdouw³**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: ¹yanti.watuseke@yahoo.com²Jantje788@gmail.com³stanleykho99@yahoo.com**ABSTRAK**

Pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia telah diberlakukan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Sejak diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SKPD dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang belanja modal dan pelaporannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, Dinas Kesehatan Kota Manado telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Manado yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan, dan sudah merealisasikan anggaran belanja modal dan melakukan pelaporannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Kata kunci: akuntansi, belanja modal, pelaporan

ABSTRACT

In Government of the Republic of Indonesia has implemented Autonomy. Regional Autonomy can be defined as the rights, powers and duties given to regulate the affairs of government and public interests at the public's aspirations. Since the enactment of Regulation No. 71 Year 2010 on Government Accounting Standards (SAP). SKPD financial report required to be properly according to applicable regulations. The purpose of this study is to know about capital expenditure and reporting on Manado City Health Department. Data used is quantitative data in the form of financial statements. The method used in this research is descriptive method to describe and interpreted research object. The results showed, Manado City Health Department has been carrying out its duties and functions as one SKPDs Manado City Government which is responsible for implementing health development programs, and has been the realization of the capital expenditure budget and do reporting in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010.

Keywords: accounting, capital expenditure, reporting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 belanja modal dibagi menjadi : Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi secara langsung dinikmati oleh aparatur.

Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Manado juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengolahan yang termasuk di dalamnya membahas tentang anggaran.

Dinas Kesehatan Kota Manado dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang lingkup kegiatannya mencakup pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini direfleksikan dengan adanya program-program yang dijalankan seperti, pengelolaan rumah sakit dan puskesmas, penanggulangan penyakit dan penyuluhan kesehatan. Pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado agar supaya anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SKPD dituntut untuk bisa melaporkan keuangannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengendalian keuangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado diukur dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Manado. Laporan keuangan inilah yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan inilah yang dijadikan salah satu pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak luar (DPRD dan masyarakat) dalam mengambil keputusan dan menilai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang belanja modal dan pelaporannya Di Dinas Kesehatan Kota Manado apakah telah memadai dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Kieso (2008:2) akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Halim, dkk. (2012:36) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2006:15) Akuntansi Sektor public adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah BUMN, BUMD, LSM Dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek keja sama sektor publik dan swasta. Halim (2007:252) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuang dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang benar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, profinsi, dan kabupaten/kota.

Belanja Modal

Halim (2007: 73) Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok belanja Administrasi Umum. Keputusan menteri No.29/2002 disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah propinsi/pemerintah pusat

Analisis Aset

Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pelaporan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Landasan Hukum penyusunan Laporan keuangan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Pasambuna (2014) dengan judul Analisis Pelaporan Dan Pengungkapan Belanja Modal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kotamobagu saat ini belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam pengakuan perolehan aktiva tetap.
2. Tafsir (2014) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Palu dalam penguraian system dan prosedur penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, dan Perlakuan Akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan telah dilakukan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun dalam perlakuan pelaporan keuangan tidak membuat Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kuncoro (2009:145) jenis data terdiri dari:

1. Data Kuantitatif
2. Data Kualitatif

Penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah Data Kualitatif yang di dapat dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Manado. Sugiyono (2010:193) Ada dua sumber data:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dalam laporan realisasi belanja modal yang di ambil dari Dinas Kesehatan Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Manado di Jalan 17 Agustus Kota Manado, Waktu penelitian Bulan September 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Medefinisikan dan Merumuskan Masalah
2. Melakukan Studi Kepustakaan
3. Mengumpulkan Data
4. Mengelolah dan Menyajikan Data
5. Menganalisis dan Menginterpretasikan
6. Menarik Kesimpulan dan Memberikan Saran

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan
2. Penelitian Lapangan

Metode Analisis Data

Metode Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Manado dan membandingkan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Manado dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 apakah sudah sesuai atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Variabel Penelitian

Dinas Kesehatan Kota Manado merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kota Manado yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan di Kota Manado dan Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai desentralisasi di bidang kesehatan. Klasifikasi belanja modal dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012s/d 2013 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal peralatan dan mesin
3. Belanja Modal gedung dan bangunan
4. Belanja Modal jalan dan irigasi

Belanja modal pengadaan tanah Dinas Kesehatan Kota Manado pada tahun 2013 untuk Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Masyarakat (PKM) Bunaken. Sedangkan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan gedung kantor, perlengkapan kantor, computer, mebeulair, kendaraan dinas, kendaraan ambulance. Dan untuk belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan gedung puskesmas, rumah dinas, rehabilitasi rumah dinas, rehabilitasi gedung kantor, rehabilitasi pustu (puskesmas pembantu). Sedangkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa konstruksi jaringan air.

Pelaporan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Manado meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan tidak mempunyai salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan yaitu komponen laporan arus kas. Dari hasil wawancara dari pihak informan, satuan kerja ini adalah entitas akuntansi maka laporan arus kas tidak dimasukkan karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan. Komponen laporan keuangan yang ada didalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP belum sepenuhnya diberlakukan.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Manado sudah melaksanakan Belanja modal berupa dalam beberapa program diantaranya berupa belanja tanah, Pembangunan Gedung Puskesmas , Rumah Dinas , Rehabilitasi serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, pengeluaran dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, perbaikan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas kualitas aset. Pada Tahun 2012 realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado berjumlah Rp 6,200,976,019 sedangkan pada tahun 2013 realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado berjumlah Rp 6,140,502,867 yang artinya jumlah total realisasi anggaran belanja modal Dinas Kesehatan Kota Manado mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan Pasambuna (2014) mengungkapkan untuk nilai, penyusutan, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktifa tetap dalam

CALK yang berarti Pemerintah Kota Kotamobagu sudah melaksanakan pengungkapan akuntansi belanja modal menurut perlakuan yang berlaku.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sesuai dengan hasil penelitian penulis di ketahui bahwa dalam pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Manado sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi tidak mempunyai salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan yaitu komponen laporan arus kas Dinas Kesehatan Kota Manado sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun laporan arus kas kecuali SKPKD sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas. Penelitian yang dilakukan Tafsir (2014) mengungkapkan DPPKAD Kota Palu dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan telah melakukan perlakuan akuntansi sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Manado saat ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Manado yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan kesehatan, dan sudah merealisasikan anggaran belanja modal pada tahun 2012 s/d 2013.
2. Dinas Kesehatan Kota Manado dalam pelaporan keuangannya sudah menerapkan komponen laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 namun untuk Laporan Arus Kas tidak di buat karena Dinas Kesehatan Kota Manado tidak melakukan fungsi perbendaharaan sebagaimana SKPKD.

Saran

1. Sekiranya untuk tahun-tahun yang akan datang Dinas Kesehatan Kota Manado dapat menyajikan Laporan Keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang dapat menyebutkan beban penyusutan dan dalam Neraca juga untuk sebutkan akumulasi penyusutan. Agar para pengguna Laporan Keuangan dapat melihat berapa beban dan akumulasi penyusutan aktiva tetap Dinas Kesehatan Kota Manado.
2. Untuk Peneliti selanjutnya yang mengambil judul yang serupa dengan penulisan skripsi ini atau mengambil objek penelitian yang sama untuk dapat memurnakan penulisan ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.

Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah(Akuntansi Sektor Publik)*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. Muhammad S.Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.

————— Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah*.

Kieso E. Donald, Jerry. J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermedit edisis kedua belas jilid 1*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi edisi tiga*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.

————— PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

————— Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

————— Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan..*

Pasambuna. T. Nelby. 2014. Analisis Pelaporan dan Pengungkapan Belanja Modal Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN: 2303-1174. Vol.1 No.4 Desember 2013. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/554>. Diakses: 3 November 2014. Hal. 2264-2381.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit: Alfa Beta. Bandung.

Tafsir. Anggela. 2014. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA* ISSN: 2303-1174. Vol. 2 No.3 September 2014. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/751>. Diakses: 3 November 2013. Hal. 361-476.

